

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya jumlah penduduk tidak selalu menjadi sebuah pertanda yang baik apabila tidak diikuti adanya penyerapan tenaga kerja yang memadai. Masalah perkembangan penduduk di Indonesia dalam hal peningkatan jumlah penduduk dapat kita lihat dari pertumbuhan penduduk Indonesia yang mempunyai kecenderungan tinggi. Tercatat pada tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia mencapai 237,641 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2020 mencapai 270,203 juta jiwa. Artinya ada penambahan jumlah penduduk dari tahun 2010 ke tahun 2020 sekitar 32,562 juta jiwa (Mu'awwanah et al., 2020). Jumlah pertumbuhan penduduk di Indonesia secara angka masih termasuk dalam kategori cukup tinggi. Masalah ketenagakerjaan juga perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia, terlebih dengan adanya bonus demografi di Indonesia yang akan mencapai puncak pada tahun sekitar tahun 2030-an. Apabila pemerintah tidak menyiasati hal ini dengan sebuah program yang bisa mewadahi dan menyerap tenaga kerja maka bisa saja bonus demografi ini menjadi boomerang bagi Indonesia sendiri, yaitu salah satunya adalah membludaknya jumlah pengangguran.

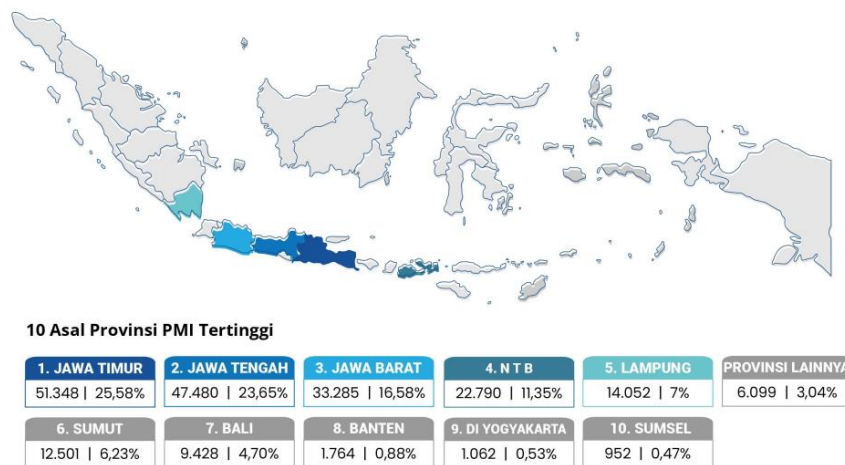
Kurangnya lapangan kerja di Indonesia bukanlah hal yang baru, tidak seimbang antara permintaan dan penawaran tenaga kerja sudah menjadi permasalahan umum yang terus diupayakan oleh pemerintah untuk membuat sebuah solusi baru dalam penyerapan tenaga kerja. Kendati mengalami tren penurunan tingkat pengangguran dalam 3 tahun terakhir pasca lonjakan akibat Covid-19 yang mencapai angka 7.07% mengalami penurunan di 2021 menjadi 6.49% dan berlanjut pada tren penurunan di 2022 yang berada di angka 5.86%

namun secara kenyataan di lapangan penurunan tersebut belum benar-benar dirasakan oleh semua kalangan masyarakat sehingga masih banyak dari masyarakat yang menganggap bahwa efek tren penurunan secara data tersebut belum sesuai dengan kenyataan yang mereka rasakan. Kurangnya lapangan kerja juga berpengaruh terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, hal inilah yang menyebabkan banyak masyarakat Indonesia memutuskan untuk menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) sebagai solusi dalam mendapatkan pekerjaan yang bisa meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan ekonomi keluarga.

Migrasi yang dilakukan oleh Indonesia telah berlangsung selama ratusan tahun yang lalu dan terjadi peningkatan secara signifikan di era modern sekitar tahun 1960-an dan 1970-an hingga saat ini. Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri disebut dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI), mereka memutuskan meninggalkan rumah atau kampung halaman karena berbagai alasan, antara lain karena kurangnya kesempatan kerja, kemiskinan dan perbedaan upah di Indonesia dengan negara tujuan. Secara resmi, pengelolaan pemerintah terhadap pengaturan PMI baru dimulai pada tahun 1969 yang ditangani Departemen Tenaga Kerja. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1970, program penempatan tenaga kerja Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) dibentuk untuk mendukung misi peluang bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam perekrutan dan penempatan tenaga kerja (IOM INDONESIA, 2010).

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang konsisten selalu mengirim pekerja migran ke negara lain, bahkan tren secara data selalu mengalami peningkatan. Akan tetapi ketika adanya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 yang kemudian berdampak pada diberlakukannya pembatasan

mobilitas nasional maupun internasional mengikis perlahan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI). Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan pada tahun 2020 sebanyak 113.436, menurun menjadi 72.624 di tahun 2021 dan mengalami peningkatan secara signifikan pada tahun 2022 menjadi 200.761. Perlu diketahui bahwa angka penempatan PMI pada tahun 2022 jauh lebih tinggi dari dua tahun sebelumnya, hal itu bukan karena tanpa sebab. Adanya pelonggaran mobilitas pasca Covid-19 menjadi alasan kembali melonjaknya angka penempatan Pekerja Migran Indonesia ditahun 2022. Menurunnya jumlah PMI yang ditempatkan di luar negeri di tahun 2020 dan 2021 faktor dominannya dipengaruhi oleh adanya penutupan akses masuk oleh negara tujuan akibat adanya pembatasan karena kasus Covid-19. Akan tetapi setelah itu berdasarkan pertimbangan pada akhirnya akses ke negara-negara untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia kembali dibuka, hal itu tertulis dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 tentang Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu Bagi Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Adanya keputusan inilah yang menjadi salah satu faktor kembali meningkatnya penempatan PMI ke beberapa negara.



Gambar 1. 1 Data Penempatan PMI Tahun 2022 Berdasarkan Provinsi

Sumber: Data BP2MI 2022

Berdasarkan data dari BP2MI di atas, Jawa Timur merupakan provinsi dengan pengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) tertinggi di Indonesia, dengan jumlah sebanyak 51.348 pada tahun 2022 dan menyumbang hingga 25,58% sebagai provinsi dengan PMI terbanyak, disusul oleh Jawa Tengah di urutan kedua dengan jumlah mencapai 47.480 atau sekitar 23,65% dari jumlah keseluruhan pengirim PMI di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan jika di Jawa Timur minat untuk menjadi migran ke luar negeri atau PMI masih sangat tinggi, terlepas dari alasan mereka melakukan migrasi karena keterpaksaan ekonomi, kemauan sendiri atau hal lain.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat ke luar negeri di dominasi oleh PMI dengan tingkat pendidikan SD dan SMP seperti pada tabel 1.1, meskipun dalam kurun dua tahun terakhir ini tingkat pendidikan SMA lumayan mendominasi. Hal ini yang juga menjadi suatu permasalahan karena purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) ketika sudah kembali ke tempat asal adalah perlunya adaptasi yang membuat kesulitan dalam mencari pekerjaan. Hal tersebut dikarenakan

adanya kebiasaan di antara purna PMI, bahwa mereka berangkat di usia produktif dan kembali ke daerah asal ketika sudah dikatakan kurang produktif atau ketika mereka sudah merasa mapan lalu pulang ke daerah asal untuk menikah dan tidak kembali lagi. Selain karena faktor usia, faktor tingkat pendidikan mereka juga mempengaruhi dalam mencari pekerjaan ketika sudah pulang ke daerah asal. Karena pada dasarnya tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap tingkat pengangguran.

Menurut Simanjuntak (1985) pendidikan dan pengangguran memiliki keterkaitan, di mana semakin tinggi rata-rata pendidikan di suatu daerah maka akan mengalami peningkatan pada sumber daya manusianya pada daerah tersebut, sehingga dapat meningkatkan kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan. Kamaluddin (1998) juga mengatakan bahwa dengan semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi kemampuan dan juga kesempatan bekerja. Seorang dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung mempunyai suatu keahlian yang beragam, sehingga dengan itu dapat meningkatkan kesempatan untuk bekerja mereka, dan juga dapat mengurangi pengangguran.

Tabel 1. 1 Jumlah Data Penempatan PMI Nasional Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017-2021

NO	PENDIDIKAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD	101.787	97.209	88.881	27.963	18.468
2	SMP	85.545	101.824	101.440	44.366	25.369
3	SMU	70.185	80.280	82.242	39.389	26.501
4	DIPLOMA	4.060	3.081	2.463	949	1.613
5	SARJANA	1.298	1.225	1.495	562	399
6	PASCA SARJANA	24	21	32	7	6

Sumber : Data BP2MI 2017-2021 (diolah)

Seperti pada sajian data tabel 1.1 di atas bahwa mayoritas mereka yang menjadi PMI adalah lulusan SMA ke bawah, bahkan ditahun 2017-2019 tingkat SD

dan SMP justru yang mendominasi menjadi PMI. Hal ini yang menjadi perhatian karena tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Dimana dapat dikatakan bahwa dengan rendahnya tingkat pendidikan akan mempengaruhi terhadap kelangsungan mereka dalam mencari pekerjaan.

Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbanyak jika dibanding provinsi lain di Indonesia seperti pada gambar 1.1 tidak didominasi oleh satu kabupaten atau kota saja, melainkan hampir merata ke seluruh wilayah kabupaten atau kota yang ada di Jawa Timur.

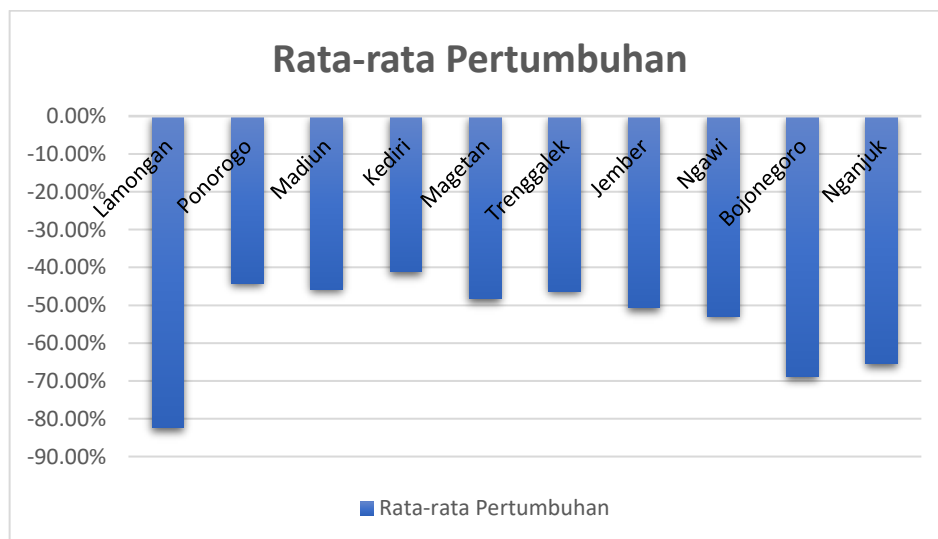
Tabel 1. 2 Penempatan PMI Asal Provinsi Jawa Timur periode Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Ponorogo	9.157	10.043	9.665	5.383	4.126
2	Blitar	8.520	9.189	9.154	5.445	4.624
3	Malang	8.370	8.839	7.928	5.583	4.831
4	Tulungagung	6.173	7.108	7.104	4.022	2.365
5	Banyuwangi	5.176	6.132	6.343	3.337	2.435
6	Madiun	4.689	4.913	4.982	2.669	2.081
7	Kediri	3.625	4.145	4.027	2.106	1.685
8	Magetan	2.786	2.989	2.975	1.508	1.158
9	Trenggalek	2.668	3.005	2.963	1.477	1.044
10	Jember	2.156	2.294	2.177	1.141	934
11	Ngawi	2.148	2.277	2.241	1.136	774
12	Bojonegoro	1.088	949	980	431	372
13	Nganjuk	1.058	1.180	1.024	430	330
14	Lamongan	830	828	823	298	86
15	Pasuruan	765	544	437	135	308
16	Jombang	555	611	503	268	234
17	Lumajang	530	673	593	337	266
18	Gresik	440	475	617	135	59
19	Surabaya	423	414	354	230	187
20	Bangkalan	249	390	426	103	121

Sumber : Data BP2MI 2017-2021 (diolah)

Sajian data pada tabel 1.2 di atas dapat menjadi bukti jika dilihat dari data per kabupaten atau kota penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari provinsi Jawa Timur tidak didominasi oleh satu Kota/Kabupaten saja. Berdasarkan data

pada tabel 1.2 diatas kabupaten/kota dengan PMI terbanyak pada tahun 2017 adalah Kabupaten Ponorogo dengan jumlah 9.157 diikuti Kabupaten Blitar kedua dan Kabupaten Malang ketiga. Akan tetapi jika kita lihat di tahun berikutnya pada tahun 2020 dan 2021 jumlah pengiriman PMI dari Kabupaten/Kota di Jawa Timur terus mengalami perubahan yang fluktuatif atau naik turun, seperti pada tahun 2021 jumlah PMI terbanyak adalah dari Kabupaten Malang sebanyak 4.831 dan Kabupaten Ponorogo mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 dan 2021. Hal itu juga terjadi pada Kabupaten Lamongan, berdasarkan data tahun 2017-2019, di tahun 2017 PMI Kabupaten lamongan tergolong tinggi yang mencapai angka 830, dan mengalami penurunan ke angka 828 pada 2018 dan menurun lagi di angka 823 ditahun 2019. Puncak penurunan terjadi pada 2 tahun terakhir dan puncaknya pada tahun 2021 yang menyentuh angka 86.



Gambar 1. 2 Diagram Rata-rata Pertumbuhan Penempatan PMI di Jawa Timur 2017-2019

Sumber : Data BP2MI 2017-2021 (diolah)

Penurunan jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) setiap tahunnya jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan penempatan Pekerja Migran

Indonesia (PMI) dari tahun 2017-2021 adalah seperti pada gambar 1.2. Dimana penurunan secara persentase paling parah adalah Kabupaten Lamongan dengan penurunan diatas -80%, yakni -82,42%. Diikuti Kabupaten Bojonegoro dengan -68,95% dan selanjutnya Kabupaten Nganjuk dengan 65,51%. Ponorogo yang sebagai pengirim PMI terbanyak di Jawa Timur juga masuk ke dalam data 10 besar dengan menempati posisi ke 9 sebagai Kabupaten/kota dengan rata-rata pertumbuhan negatif tertinggi dengan angka -44,23%. Dengan menurunnya jumlah penempatan PMI seperti pada tabel 1.2 dan penurunan secara persentase rata-rata pertumbuhan seperti pada gambar 1.2 pada dasarnya adalah sebuah fenomena baru, karena pada tahun-tahun sebelumnya pengiriman PMI ke luar negeri sangat masif dilakukan sehingga jumlah tiap tahunnya terus meningkat.

Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan merupakan salah satu desa di Kabupaten Lamongan yang tergolong mayoritas masyarakatnya menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI), utamanya adalah mereka menjadi migran di negara tetangga Malaysia. Fenomena mengenai pekerja migran yang sangat menyita perhatian adalah karena terdapat kurang lebih sekitar 1.667 penduduk desa Payaman pada tahun 2013 menjadi pekerja migran utamanya di negara Malaysia. Fenomena tersebut sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Dari banyaknya jumlah pekerja migran tersebut, membuat Desa Payaman mendapat julukan “Desa TKI” (Su’aeb, 2014) dalam (Agus Wahid Suyoto, 2023). Akan tetapi berbanding terbalik dengan keadaan sekarang, sama halnya dengan yang terjadi di Kabupaten Lamongan, jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Desa Payaman juga terus mengalami penurunan. Hal ini pastinya didasari oleh beberapa faktor yang menyebabkan

minat dari masyarakat Desa Payaman untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) menurun.

Kurva penawaran tenaga kerja menunjukkan hubungan antara jumlah jam kerja dan jumlah pekerja pada tingkat upah yang berbeda. Pada tingkat upah di atas reservasi (upah minimum), kurva penawaran tenaga kerja mempunyai kemiringan positif hingga titik tertentu. Situasinya kemudian berubah ketika kesejahteraan meningkat, keterampilan meningkat, atau jumlah jam kerja yang ditawarkan menurun seiring dengan kenaikan upah, yang mengakibatkan kemiringan negatif pada kurva penawaran tenaga kerja dan kurva bergerak mundur atau melengkung ke bawah atau *backward-bending labor supply curve* (Borjas, 2016). Pada kurva *backward-bending labor supply*, saat tingkat upah berada pada titik diatas upah reservasi penyediaan waktu kerja individu akan bertambah apabila upah bertambah (kemiringan kurva positif). Setelah mencapai tambahan upah pada titik tertentu, pertambahan upah justru mengurangi waktu yang dialokasikan individu untuk keperluan bekerja (kemiringan kurva menjadi negatif atau kebelakang).

Apabila didasarkan pada teori penawaran tenaga kerja, terutama sesuai dengan kurva *backward bending labor supply*, maka dapat dikatakan jika salah satu yang menyebabkan faktor seseorang menurunkan jumlah jam kerjanya adalah karena adanya peningkatan terhadap pendapatan yang pekerja tersebut peroleh, atau bisa karena kesejahteraannya yang sudah meningkat ataupun karena ia mempunyai suatu keahlian yang lebih atau khusus. Akan tetapi yang terjadi di Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan jika dilihat dari segi keahlian seperti yang penulis sajikan di Tabel 1.2 bahwa tingkat pendidikan dari PMI rata-rata adalah lulusan SD dan SMP, sehingga dapat

dikatakan jika keahlian tersebut didasarkan pada tingkat pendidikan maka mereka termasuk belum memiliki keahlian yang lebih seperti pada teori penawaran tenaga kerja kurva *backward bending labor supply*. Selain itu dari segi kesejahteraan apabila mereka tergolong sejahtera pastinya mereka purna migran tidak akan kembali mencari pekerjaan sampai ke luar kota. Maka dari itu adanya ketidaksesuaian dengan kondisi yang seharusnya yaitu migran mengurangi jumlah jam kerja (memutuskan tidak kembali bekerja ke luar negeri) padahal apabila dilihat kesesuaian teori belum dapat dikatakan sesuai.

Tahap observasi awal yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara singkat dengan salah satu warga desa Payaman yang bernama bapak Huda pada tanggal 11 November 2023, beliau merupakan purna migran yang memutuskan untuk tidak kembali bekerja ke luar negeri. “Faktor umur yang dianggap sudah kurang produktif untuk bekerja di luar negeri dan juga mahal biaya untuk penempatan menjadi faktor yang mempengaruhi purna migran tidak kembali lagi bekerja ke luar negeri”. “Setelah memutuskan untuk tidak kembali bekerja ke luar negeri bukan berarti merasa karena sudah sejahtera dan tidak perlu bekerja lagi, melainkan mencari pekerjaan yang antara modal dan hasilnya sepadan, dengan bekerja di luar kota yakni di ternate dan bekerja dibagian kabel”. “Ada beberapa juga purna migran asal Payaman yang bekerja ditempat dan bagian yang sama dan memutuskan untuk tidak kembali bekerja ke luar negeri, ada sekitar 10 persenan purna migran yang tidak kembali dan bekerja disana”.

Alasan peneliti tertarik untuk meneliti Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Desa Payaman adalah karena adanya penurunan yang signifikan jumlah PMI di Desa Payaman yang otomatis mengurangi jam kerja mereka yang secara teori penawaran tenaga kerja belum memenuhi untuk dilakukan atau belum berada

pada titik tersebut, akan tetapi yang pastinya keputusan mereka dipengaruhi oleh beberapa hal yang rasional berdasarkan keputusan individu mereka. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui hal apa yang menjadi alasan atau rasionalisasi keputusan mereka untuk tidak lagi menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas mengenai **“Rasionalitas Keputusan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tidak Kembali Bekerja Ke Luar Negeri (Studi Kasus Pada Purna Pekerja Migran Indonesia di Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang bahwasanya di Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan dulunya adalah salah satu desa dengan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sangat banyak. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami penurunan sehingga perlu dianalisis apa alasan mereka tidak kembali menjadi migran atau tidak kembali bekerja di luar negeri, maka dari itu peneliti menghasilkan rumusan masalah “Bagaimana rasionalitas Pekerja Migran Indonesia (PMI) memutuskan tidak kembali bekerja ke luar negeri di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis rasionalitas keputusan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak kembali bekerja ke luar negeri di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat diambil beberapa manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan juga kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan ilmu ekonomi bidang ketenagakerjaan, khususnya masalah migrasi tenaga kerja.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan bisa memberikan informasi bagaimana keputusan migran tidak kembali ke luar negeri sehingga pemerintah mengetahui hal-hal yang membuat pekerja migran tidak kembali ke luar negeri sebagai rekomendasi kebijakan pemerintah desa.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) mengenai segala hal yang bisa saja terjadi (risiko) ketika bekerja di luar negeri
- c. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi bagi masyarakat tentang bagaimana gambaran kondisi bekerja di luar negeri.